

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung, Pokok-pokok Petanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seleksi Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UGM, 1982).
- Junaedy Ganie, *"Hukum Asuransi Indonesia"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
- Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: Penerbit OJK, 2014)
- Manurung, Adler Haymans. *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, (Jakarta: Manurung Press, 2013)
- Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017)
- Man Suparma Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2003)
- Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Putaka Setia, 2015).
- Richard Burton Simaputang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bura'ne: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia).
- Salman, *Peran Dan Pengawasan OJK*, (Jakarta: Institue Bankir Indonesia, 2016).
- Shubhan, Hadi. *"Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981).
- Suparman Sastra, *Aspek –Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014)
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2016)
- Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

JURNAL NASIONAL

- Alfi, M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Aryani Witasari, *Tinjauan Teori Hukum Kewenangan Lembaga Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Vol. 30, No. 4, 2014.
- Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2012.
- Husain, Fajrin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, 2016.
- Marcella, C., *Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Muhammad Alfi, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Muhammad Alfi, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017
- Solaiman, A. A., *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No.2, 2018.
- Utami, Yuni. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia." *Permana*, Vol. 3, No. 2, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021

WEBSITE/INTERNET

Maria Astri Yunita, *Peran OJK Sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5645b7892a4e7/peran-ojk-sebagai-pemohon-pailit-perusahaan-asuransi>, diakses pada tanggal 6 November 2021.

